



Penguatan Kinerja Inovasi Daerah melalui Evaluasi Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Award (IGA) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Oleh :

M. Arliyan Syahrial, M.Pd,
Jerry Walo, S.Sos, MM,
Ary Wibawa, S.AP., M.AP,
Hairul Ikhwan, S.Hut,
Yunita Anggeriana, S.Hut.
Dicky Maulana, S.Kom.
Muhammad Rifqian Nafi, A.Md.T.

PENDAHULUAN

Inovasi daerah merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi tidak hanya berfungsi sebagai alat peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik, tetapi juga sebagai indikator daya saing daerah dalam konteks pembangunan nasional.

Evaluasi terhadap inovasi daerah dilakukan melalui Indeks Inovasi Daerah (IID) dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), yang menilai aspek kuantitas, kualitas, dan kemanfaatan inovasi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan kinerja yang progresif dengan capaian predikat "Sangat Inovatif" secara konsisten hingga tahun 2025 dengan skor 73,59, serta menempati peringkat 40 secara nasional dan peringkat 3 di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian, capaian tersebut masih menyisakan sejumlah tantangan struktural dan substantif yang memerlukan intervensi kebijakan yang tepat.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan hasil evaluasi IID dan temuan lapangan, terdapat beberapa permasalahan utama dalam penguatan inovasi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

1. Rendahnya tingkat kematangan inovasi daerah, yang tercermin dari nilai kematangan di bawah ambang optimal (<60).
2. Kualitas data dukung inovasi yang belum optimal, khususnya terkait evidence, validitas, dan konsistensi pelaporan.
3. Orientasi inovasi yang masih berfokus pada output, belum sepenuhnya mengarah pada outcome dan dampak nyata bagi masyarakat.

Ringkasan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja inovasi daerah yang sangat progresif dengan capaian predikat "Sangat Inovatif" dan skor Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 73,59 pada tahun 2025, menempati peringkat 40 secara nasional dan peringkat 3 di Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi sebagai instrumen peningkatan kinerja pelayanan publik dan daya saing daerah. Namun demikian, keberhasilan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama pada aspek kematangan inovasi, kualitas data dukung, serta orientasi inovasi yang masih cenderung berfokus pada output dibandingkan outcome.

Secara substantif, permasalahan utama terletak pada belum optimalnya kualitas dan keberlanjutan inovasi, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kematangan inovasi dan adanya catatan validator terkait validitas evidence serta konsistensi pelaporan. Selain itu, integrasi inovasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD masih belum maksimal, serta pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai instrumen perlindungan dan peningkatan daya saing inovasi juga belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam pengelolaan inovasi daerah.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui pendekatan integratif yang menyeimbangkan aspek kuantitas, kualitas, dan dampak inovasi. Rekomendasi utama meliputi peningkatan inovasi berbasis outcome, optimalisasi peran kelembagaan seperti BRIDA/Bappedalitbang, perbaikan sistem pelaporan dan validasi data, serta penguatan ekosistem inovasi melalui kolaborasi multipihak dan fasilitasi HAKI. Dengan strategi tersebut, diharapkan inovasi daerah tidak hanya meningkatkan skor IID, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. Belum optimalnya integrasi inovasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan Renstra OPD.
5. Minimnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai instrumen perlindungan dan peningkatan daya saing inovasi daerah.

TUJUAN POLICY BREIF

Policy brief ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi dan tantangan penguatan inovasi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja inovasi daerah.
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) dalam rangka peningkatan kualitas dan keberlanjutan inovasi daerah.

ANALISIS KEBIJAKAN

A. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Penguatan inovasi daerah didukung oleh kerangka regulasi yang komprehensif, antara lain:

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
3. Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Inovasi Daerah

Dalam konteks kelembagaan, peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)/Bappedalitbang menjadi krusial sebagai koordinator, evaluator, dan fasilitator inovasi daerah.

B. Evaluasi Kinerja Inovasi Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren peningkatan kinerja inovasi dengan predikat "Sangat Inovatif" secara konsisten. Namun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Jumlah inovasi meningkat signifikan, namun belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan dampak.
2. Validasi data inovasi masih menjadi kendala utama, terutama dalam aspek pembuktian (evidence-based).
3. Kematangan inovasi belum optimal, yang menunjukkan perlunya penguatan pada aspek keberlanjutan dan replikasi inovasi.

C. Dimensi Kritis Penguatan Inovasi

Penguatan inovasi daerah perlu difokuskan pada beberapa dimensi utama:

1. Dimensi Kualitas dan Kemanfaatan
Inovasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar memenuhi indikator administratif.
2. Dimensi Replikasi dan Skalabilitas
Inovasi yang berhasil harus dapat direplikasi melalui pendekatan Amati, Tiru, Modifikasi (ATM).
3. Dimensi Tata Kelola dan Akuntabilitas
Pelaporan inovasi harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik KKN.
4. Dimensi Integrasi Perencanaan
Inovasi harus menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

OPSI KEBIJAKAN

A. Opsi 1: Pendekatan Kuantitatif

Fokus pada peningkatan jumlah inovasi yang dilaporkan.

Kelemahan: berpotensi menurunkan kualitas dan dampak inovasi.

B. Opsi 2: Pendekatan Kualitatif

Fokus pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan inovasi.

Kelemahan: dapat menurunkan jumlah inovasi yang dihasilkan.

C. Opsi 3: Pendekatan Integratif (Rekomendasi)

Mengintegrasikan aspek kuantitas, kualitas, dan replikasi inovasi secara seimbang.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Inovasi Berbasis Outcome
Mengarahkan inovasi pada pencapaian dampak nyata bagi masyarakat.
2. Optimalisasi Peran BRIDA/Bappedalitbang
Memperkuat fungsi koordinasi, evaluasi, dan fasilitasi inovasi daerah.
3. Perbaiki Sistem Pelaporan dan Validasi Data
Mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital yang terstandarisasi dan terintegrasi.

4. Integrasi Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan
Menjadikan inovasi sebagai indikator kinerja utama dalam RPJMD dan Renstra OPD.
5. Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
Melalui pelatihan, coaching clinic, dan kolaborasi multipihak.
6. Peningkatan Fasilitas HAKI
Melindungi inovasi sebagai aset strategis daerah dan meningkatkan daya saing.
7. Penguatan Strategi Replikasi Inovasi
Mendorong diseminasi dan adopsi inovasi unggulan antar perangkat daerah.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat:

1. Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan inovasi daerah
2. Memperkuat daya saing daerah dalam skala nasional
3. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi

KESIMPULAN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kinerja inovasi yang sangat baik secara kuantitatif. Namun, untuk mencapai tingkat kematangan inovasi yang optimal, diperlukan transformasi kebijakan yang berfokus pada kualitas, keberlanjutan, dan dampak inovasi. Pendekatan integratif yang menggabungkan aspek regulasi, kelembagaan, dan ekosistem inovasi menjadi kunci dalam penguatan inovasi daerah secara berkelanjutan.